

ABSTRAK

Albalad, Ricky Cahyadi. 2024. Pertanggungjawaban Perdata Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Nur Fauzia, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Notaris, Akta Autentik.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitiannya yaitu pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan yaitu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkan sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhkan sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UJNP. Pasal 66 UJNP ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

ABSTRACT

Albalad, Ricky Cahyadi. 2024. Civil Liability of Notaries in Making Authentic Deeds Based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum. As Supervisor I and Nur Fauzia, S.H., M.H. As Supervisor II.
Keywords: Civil Liability, Notary, Authentic Deed.

This research aims to determine the Civil responsibilities of Notaries in making Authentic Deeds based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries and to find out the legal protection for Notaries in Making Authentic Deeds based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. This research includes normative juridical research. The results of the research are the civil liability of Notaries in making Authentic Deeds based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Position, namely being held accountable for their actions by being subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs or compensation to parties who are harmed by acts against them. law carried out by a Notary. However, before the Notary is subject to civil sanctions, the Notary must first be able to prove that there has been a loss resulting from the Notary's unlawful actions against the parties, and that between the losses suffered and the Notary's unlawful actions there is a causal relationship, as well as the unlawful actions or negligence. caused by errors that can be accounted for by the Notary concerned. Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, namely the legal protection given to (Position) Notaries is regulated in Article 66 UJNP. Article 66 of the UJNP regulates the formation of a Notary Honorary Council (MKN) consisting of representatives of Notaries, the government and academics, which functions as a legal protection institution for Notary Positions related to deeds made by or before them.